

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) (Kasus: Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Community Participation in Kampung KB Program (Case: Kapas Village, Kunjang Subdistri, Kediri Regency, East Java)

An-Nur Vicki Sabilla, Ninuk Purnaningsih

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: sabillavicki@gmail.com

ABSTRACT

Kampung KB is one of the innovations launched by the 2016 BKKBN to address population growth and prosperity. Programs that involve several of these sectors require a large portion of the community. Participation in several factors, namely internal factors and external factors. The purpose of this study was to study the relationship between internal factors and external factors with the level of community participation in the Kampung KB Program specifically for the activities of Family Development for Toddlers, Elderly Family Development, and Family Planning Safari. The method used in this study is a quantitative method supported by qualitative data. Internal factors related to participation is type of work. The external factor that has a relationship with participation is the role of cadre assistance and the role of the Kampung KB management.

Keywords: *Kampung KB program, community participation*

ABSTRAK

Kampung KB merupakan merupakan salah satu inovasi yang dicanangkan oleh BKKBN pada tahun 2016 guna mengatasi pertumbuhan penduduk dan mensejahterakannya. Program yang mencakup beberapa sektor ini membutuhkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Partisipasi berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB, khususnya pada kegiatan BKB, BKL, dan safari KB. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Faktor internal yang berhubungan dengan tingkat partisipasi adalah jenis pekerjaan. Faktor eksternal yang berhubungan dengan tingkat partisipasi adalah peran pendampingan kader dan peran pengurus Kampung KB.

Kata kunci: program kampung KB, partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program yang dibentuk oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada tanggal 14 Januari 2016 melalui penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tidak hanya menangani masalah pengendalian penduduk namun juga mencakup beberapa bidang, seperti bidang pendidikan, pembangunan, perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Kampung KB mencakup beberapa bidang yang mana diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat terutama mereka yang ada di kalangan bawah. Selain itu, Kampung KB juga diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi sehingga pertumbuhan penduduk di Indonesia tetap terkendali.

Program Kampung KB adalah inovasi dari Program KB yang sudah mulai menurun eksistensinya di kalangan masyarakat. Menurunnya eksistensi Program KB ditandai dengan menurunnya keikutsertaan ber-KB pada masyarakat dan meningkatnya *Total Fertility Rate (TFR)* sehingga membuat stagnasi dalam sepuluh tahun terakhir karena minimnya anggaran di daerah dan Program KB tidak dijadikan agenda prioritas pembangunan terutama di tingkat desa (Bintang 2017), sehingga pemerintah melalui BKKBN membuat program guna mengingatkan masyarakat kembali akan pentingnya KB.

Kampung KB akan tersebar di seluruh Indonesia dan diharapkan satu kecamatan memiliki satu Kampung KB (Wulandari 2018). Menurut data BKKBN pada bulan Juli 2019, total Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 14521 kampung dengan total Kampung KB di wilayah

Jawa Timur sebanyak 643 kampung sedangkan di Kabupaten Kediri terdapat 52 kampung. Jumlah Kampung KB di Indonesia akan terus bertambah setiap bulannya. Hal ini menjadi menarik karena dengan semakin banyaknya Kampung KB di Indonesia, maka permasalahan di Indonesia diharapkan akan semakin berkurang.

Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN 2015), sehingga program tersebut dekat dengan masyarakat. Pelaksanaan Kampung KB dekat dengan masyarakat karena program ini diselenggarakan di desa itu sendiri dan hampir semua yang terlibat di dalamnya adalah orang dari desa tersebut sehingga pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan secara kekeluargaan. Manfaat dari adanya Kampung KB yaitu untuk membantu masyarakat dalam perbaikan jalan di desa, bedah rumah, pembangunan jamban, hingga layanan kesehatan dan pengobatan gratis (Bintang 2017). Banyaknya manfaat dari program tersebut menunjukkan bahwa Kampung KB tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk saja namun mencakup sektor lain.

Salah satu prasyarat wajib terbentuknya Kampung KB adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkontribusi dalam hal fisik maupun non fisik dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi pembangunan (Afiat 2018). Ternyata partisipasi tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik pada suatu program, seperti penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang menyebutkan bahwa partisipasi masih belum berjalan secara optimal (Rizal 2016). Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh PLKB (Petugas Lapang Keluarga Berencana) terhadap peserta KB dan kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pengetahuan. Jika kondisi ini terus terjadi maka manfaat dari suatu program akan kurang maksimal. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai

untuk mengatasi masalah mereka atau memiliki kesadaran kritis (Nasdian 2014).

Partisipasi masyarakat dalam Kampung KB adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya (BKKBN 2015). Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB adalah kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di Kampung KB, mulai dari mengikuti sosialisasi KB, konsultasi perkembangan anak, serta konsultasi kesehatan lansia dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat didukung oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar atau lingkungan yang dapat mendukung individu dalam melakukan suatu tindakan.

Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, Jawa Timur adalah salah satu desa yang sudah atau sedang ditunjuk sebagai tempat dilaksanakannya Program Kampung KB. Desa ini mendapat kesempatan menjadi Kampung KB sejak 4 Desember 2017. Kampung KB terdiri dari berbagai kegiatan namun di Desa Kapas hanya terdapat kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan safari KB (Keluarga Berencana) sehingga partisipasi dalam Program Kampung KB pada penelitian ini berarti partisipasi masyarakat dalam 3 kegiatan tersebut. Topik ini menarik diteliti karena tujuan dari adanya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang mencakup beberapa sektor dan membutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Bintang (2017) mengenai "Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Banjar Pilon Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar", masyarakat masih kurang aktif dalam mengikuti Program KB. Oleh karenanya, penulis ingin menganalisis lebih jauh mengenai **bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri?**

Tujuan penulisan skripsi terkait "Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB" ini, yaitu:

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas
2. Menganalisis hubungan antara faktor internal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas
3. Menganalisis hubungan antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas

PENDEKATAN TEORITIS

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu program pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat tersebut tidak hanya dilakukan pada saat program dilaksanakan, namun juga pada tahap awal program tersebut akan dicanangkan hingga program tersebut selesai dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Soetrisno (1995) dalam Karwur (2016) yang mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Rofiq (2018) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yaitu ketersediaan berkorban dari masyarakat untuk berkontribusi melalui uang, barang, tenaga, ketrampilan, jasa dan dalam bentuk kemudahan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota masyarakat dan ditunjukkan untuk kepentingan program pembangunan yang diinginkan. Cohen dan Uphoff (1980) membagi partisipasi kedalam beberapa tahap:

1. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan yaitu tahap dimana masyarakat dilibatkan dalam rapat perencanaan program. Pada tahap ini masyarakat diajak untuk merencanakan program bersama dengan pemerintah agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tahap perencanaan di Kampung KB kurang melibatkan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2017) di Kampung KB Banjar Pilan

dimana masyarakat belum dilibatkan dari segi perencanaan atau pembuatan keputusan. Semua kegiatan hanya dari satu pihak saja yakni pemerintah.

2. Tahap pelaksanaan yaitu tahap dilaksanakannya program yang sudah direncanakan. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam sebuah program, karena inti dari sebuah program adalah pelaksanaannya. Pelaksanaan digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program. Pelaksanaan kegiatan pada Program Kampung KB yang paling banyak dilaksanakan yaitu Bina Keluarga baik pada balita, remaja, maupun lansia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2017) menyebutkan bahwa kegiatan yang rutin berjalan di Kampung KB Banjar Pilan adalah posyandu, sementara kegiatan lainnya masih belum berjalan maksimal.

3. Tahap menikmati hasil yaitu tahap dimana masyarakat memperoleh hasil dari sebuah program. Tahap ini dapat dijadikan indikator keberhasilan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat dijadikan sebagai subyek pembangunan dimana semakin besar manfaat yang didapatkan oleh masyarakat maka semakin berhasil program tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat dalam Program Kampung KB sangat besar. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2017) yang dilakukan di Kampung KB Banjar Pilan dimana masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari adanya Kampung KB salah satunya pada kegiatan KB.

4. Tahap evaluasi yaitu tahap pemberian evaluasi bagi program yang sudah atau sedang dilaksanakan. Tahap ini biasanya dilaksanakan pada akhir program sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Pada kegiatan evaluasi dalam Program Kampung KB masyarakat kurang dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang (2017) di Kampung KB Banjar Pilan dimana evaluasi hanya dilakukan oleh Dinas P5KB dengan PLKB saja. Sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana perkembangan Program Kampung KB yang ada di Banjar Pilan.

Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Partisipasi

Pelaksanaan partisipasi tentunya melibatkan beberapa faktor yang mendukung masyarakat. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dan ada dalam diri individu yang dapat mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Faktor internal masyarakat dalam mengikuti program KB di antaranya umur, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, pekerjaan, dan jumlah anak (Wulandari 2018). Faktor internal erat kaitannya dengan karakteristik seorang individu. Menurut Cohen dan Uphoff (1980) hal penting yang menjadi latar belakang karakteristik masyarakat yaitu:

1. Usia dan Jenis Kelamin

Usia memiliki keterkaitan dengan tingkat partisipasi seorang individu. Usia menurut Badan Pusat Statistik (2019) adalah informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi yang digunakan untuk mengetahui usia dari responden. Menurut Marysya (2017) hal tersebut dikarenakan semakin tua seseorang, maka relatif berkurang juga kemampuan fisiknya dan keadaan tersebut akan mempengaruhi partisipasi sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa usia seseorang mempengaruhinya dalam mengikuti kegiatan. Pengkategorian jenis kelamin ialah perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan perbedaan fisik diantara keduanya (Cohen dan Uphoff 1980). Jenis kelamin seseorang dapat menentukan partisipasinya di suatu lingkungan, biasanya laki-laki mempunyai jiwa partisipasi yang tinggi sedangkan perempuan lebih kepada partisipasi yang bersifat sosial dan harta benda.

2. Tingkat pendidikan

Menurut BPS (2019) dapat dibagi menjadi empat katerori, yaitu: a) Pendidikan formal yang merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan PT; b) Pendidikan non formal yang merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal

meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), atau pra sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C), serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan kepada para peserta didik; c) Tidak/belum pernah sekolah yang merupakan status tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar; d) Tamat sekolah yang merupakan status peserta didik yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah pendidikan formal terakhir yang pernah didapatkan oleh individu. Biasanya semakin tinggi pendidikan seorang individu maka semakin tinggi pula partisipasi sosialnya karena mereka menjadi lebih paham dan peka terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Marysya (2017) tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata yang ditunjukkan dengan tingginya keinginan masyarakat menjaga dan melestarikan.

1. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Uphoff (1980) karakteristik jenis pekerjaan dapat dikategorikan atas dua jenis, yaitu: 1) Ahli agrikultur yang dapat dibagi menjadi pemilik lahan berskala besar; pembudidaya pemilik skala kecil; penyewa, baik penyewa atau petani penggarap; buruh tani; dan 2) Petani non-pertanian yang dapat dibagi menjadi pengusaha; pengrajin; profesional; pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga; siswa; dan seterusnya, ke dalam sejumlah klasifikasi yang relevan bergantung pada jenis proyek dan karakteristik penting yang sedang dievaluasi. Dapat disimpulkan bahwa jenis

pekerjaan adalah mata pencaharian individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Lama Bermukim dan Jarak Rumah ke Tempat Kegiatan Lama bermukim adalah lama tinggal seseorang dalam suatu wilayah. Menurut Suroso *et.al.* (2014) semakin lama masyarakat menetap di suatu desa, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih meningkatkan partisipasinya dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Jarak rumah ke tempat kegiatanpun juga dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Semakin dekat jarak rumah mereka dengan tempat kegiatan, maka mereka akan lebih sering melakukan partisipasi daripada mereka yang jarak rumahnya jauh dari tempat kegiatan.

Selain empat faktor yang disebutkan di atas, tingkat kesejahteraan keluarga juga memiliki kaitannya dengan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat kesejahteraan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 terdapat empat indikator kesejahteraan keluarga yaitu: 1) Keluarga Pra Sejahtera, 2) Keluarga Sejahtera 1, 3) Keluarga Sejahtera 2, 4) Keluarga Sejahtera 3, dan 5) Keluarga Sejahtera 3 Plus. Indikator keluarga sejahtera tersebut diantaranya:

1. Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan agama.

2. Keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang semua anggota keluarganya makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah atau berpergian, rumah yang ditempati memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik, bila ada keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan, apabila PUS ingin menggunakan KB maka pergi ke pelayanan kontrasepsi seperti puskesmas, bidan, dan lain sebagainya, serta semua anggota keluarga yang berusia 7-15 tahun bersekolah.

1. Keluarga Sejahtera 2 adalah semua anggota melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, paling kurang dari seminggu semua anggota keluarga makan daging/telur/ikan, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian baru kurang lebih satu stel dalam setahun, luas lantai rumah kurang lebih 8 m² untuk setiap penghuni rumah, tiga bulan terakhir semua anggota keluarga

dalam keadaan sehat, ada satu atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, semua anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca tulis latin, PUS dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.

2. Keluarga Sejahtera 3 adalah keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, sebagian penghasilan keluarga ditabung, keluarga melakukan makan bersama paling kurang seminggu sekali, keluarga mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

3. Keluarga Sejahtera 3 Plus adalah keluarga memberikan sumbangan secara sukarela pada kegiatan sosial, ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/masyarakat/yayasan/institusi masyarakat.

Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar dapat berupa lingkungan yang dapat mendukung individu dalam melakukan sesuatu. Peran pendampingan merupakan salah satu faktor eksternal. Menurut Wulansari (2009) peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pendampingan adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan, baik yang berada dalam sistem sosial masyarakat maupun berada di luar sistem sosial masyarakat yang bersangkutan (Susanto 2010). Pendampingan merupakan peranan, yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran ketrampilan teknis (Ife 2008). Dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan adalah tugas yang harus dilakukan oleh individu yang berguna untuk membawa perubahan baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di luar lingkungan masyarakat. Terdapat dua faktor eksternal dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Kampung KB diantaranya:

1. Peran pendampingan kader, pendataan dan pemetaan sasaran dan potensi wilayah, pertemuan rutin, KIE, konseling, fasilitas layanan kependudukan, KB, pembangunan keluarga, dan sektor lainnya kepada keluarga, pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan, pengembangan, pencatatan, dan pelaporan (BKKBN 2017).

2. Peran pengurus Kampung KB, menurut BKKBN (2017) pengurus Kampung KB terdiri dari Kepala Desa/Lurah (Pelindung/penanggungjawab), BPD, ketua TP-PKK desa/kelurahan, PD, PPKBD/Pos KB (Penasehat), Kepala dusun/Ketua RW/Tokoh masyarakat (Ketua), Sub-PPKBD/Sub-Pos KB (Sekretaris), Pengurus PKK RW (Bendahara) serta seksi-seksi (keagamaan, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan). Peran pengurus dalam penelitian ini terdiri dari peran ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Kampung KB. Peran ketua dan wakil ketua Kampung KB antara lain yaitu menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung KB, membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja, dan melakukan koordinasi dengan semua pihak. Peran sekretaris diantaranya melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB, menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung KB, dan membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB. Adapun peran bendahara antara lain menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan, dan bertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB (BKKBN 2017).

Sejarah KB

Sejarah KB di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dimana pada saat itu Program KB merupakan sebuah program yang berfokus pada pengendalian penduduk melalui penggunaan alat kontrasepsi. Program KB mempunyai slogan yang diberi nama cukup dua anak, laki-laki perempuan saja. Pada saat itu kekuasaan pemerintah sangat kuat dalam menjalankan tugasnya untuk mengendalikan penduduk. Masyarakat dijadikan sebagai objek, sehingga mereka harus mengikuti aturan yang ada. Masyarakat dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi tanpa memperhatikan aspek kesehatan, kondisi tubuh, serta tanpa mendapatkan penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan dari alat kontrasepsi tersebut. Kejadian tersebut mendapatkan banyak kecaman dari beberapa pihak baik dari dalam maupun luar negeri (Zaeni 2006).

Pada tahun 1992 terjadi pergeseran makna setelah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera disahkan. Meskipun tidak jauh berbeda, Program KB semakin mendapat nilai positif dari masyarakat. Pada tahun 1996 Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang

diratifikasi Indonesia telah mengubah paradigma tentang Program KB, dimana sebelumnya dengan pendekatan target demografi yang melalui pengendalian populasi dan penurunan fertilitas kemudian diubah menjadi pendekatan akses dan kualitas dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender yang meletakkan penduduk sebagai “Pusat Pembangunan” (Zaeni 2006).

Program Keluarga Berencana memiliki tujuan yaitu untuk membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang berguna untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan dan mengurangi insiden kehamilan beresiko tinggi, kesakitan, dan kematian; membuat pelayanan yang memiliki mutu terjangkau, diterima, dan mudah diperoleh semua orang yang membutuhkan; meningkatkan mutu nasehat, komunikasi, informasi, edukasi atau Pendidikan serta konseling yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuntungan atau resiko dari Program Keluarga Berencana supaya kelangsungan program dapat berjalan dengan baik (Febriansyah 2015). Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Berencana memiliki banyak manfaat untuk menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Keluarga Berencana adalah upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengaturan jarak kelahiran anak dan jumlah anak yang diinginkan melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi yang ditujukan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) yang berguna untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Program KB diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk di Indonesia dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Selain dapat menurunkan jumlah penduduk, KB diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk yang ideal, peningkatan kualitas penduduk dapat dengan mudah untuk dilakukan contoh kecilnya seperti pada keluarga.

Kampung KB

Kampung KB adalah program pemerintah yang terdiri dari beberapa sektor didalamnya guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat, mulai dari masalah kependudukan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, program ini tidak hanya menangani

masalah kependudukan yang berkaitan dengan pemasangan alat kontrasepsi saja namun juga mencakup sektor lainnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari BKKBN tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN 2015).

Program Kampung KB diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016. Program ini dibentuk guna menyukseskan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor tiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dan agenda prioritas nomor lima “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selain itu juga untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional tahun 2015-2019 dimensi pembangunan manusia pada pembangunan bidang kesehatan dan mental/karakter (revolusi mental) (BKKBN 2015).

Pelaksanaan Kampung KB melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN bersama dengan kementerian/lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota (BKKBN 2015). Kampung KB dibentuk sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program KB. Kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Kampung KB masyarakat diharapkan akan lebih mudah dalam menggunakan KB dan membantu pemerintah dalam menyukseskan Program KB.

Tujuan umum dari Kampung KB adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan

pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tujuan khusus dari Kampung KB ialah meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan dan lain sebagainya (BKKBN 2015).

Prasyarat wajib Kampung KB menurut BKKBN (2015) dalam proses pembentukannya, yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, serta adanya partisipasi aktif masyarakat. Ruang lingkup pelaksanaan Kampung KB mencakup beberapa bidang yaitu 1) kependudukan, 2) keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, 3) ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga), 4) kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB. Sasaran yang merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan Kampung KB itu sendiri menurut BKKBN (2015) yaitu: (1) keluarga, (2) remaja, (3) penduduk lanjut usia (lansia), (4) Pasangan Usia Subur (PUS), (5) keluarga dengan balita, (6) keluarga dengan remaja, (7) keluarga dengan lansia, dan (7) sasaran sektor sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pelaksananya terdiri dari kepala desa/lurah, ketua RW, ketua RT, PKB/PLKB/TPD, petugas lapang sektor terkait, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa/kelurahan, institusi masyarakat pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD), tokoh masyarakat (tokoh adat/tokoh agama di desa/kelurahan), dan kader.

Petugas Lapang Keluarga Berencana (PLKB) dan kader memiliki peran yang besar dalam menyukseskan Program Kampung KB. Hal tersebut didukung oleh pendapat Chealie dan Susanti (2018) dalam bukunya yang berjudul “Kampung KB Upaya Nyata Membangun Bangsa”, peningkatan kapasitas bagi seluruh pengelola dan pelaksana Kampung KB mulai dari tingkat provinsi sampai desa tidak kalah penting untuk menyukseskan Program Kampung KB. Peserta dari desa tersebut yaitu kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), kader KB/kesehatan, PLKB, bidan, dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Buku tersebut juga menjelaskan motivator KB yaitu para anggota Tim KB Desa (TKBD), peran kader, anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), termasuk penyuluh KB (PLKB) memiliki peran penting dalam meyakinkan masyarakat agar ikut mendukung dan menjalankan program. Hal tersebut dibuktikan oleh kontribusi mereka yang berhasil memberikan dampak positif bagi kemajuan Program KKBPK di Kabupaten Bengkayang, termasuk untuk pelaksanaan Program Kampung KB.

Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB

Masyarakat mempunyai peran penting dalam menyukseskan suatu program pemerintah. Kampung KB merupakan sebuah program pemerintah yang tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Adanya Kampung KB di setiap wilayah yang ada di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat namun tidak semua wilayah dapat dijadikan sebagai Kampung KB. Terdapat prasyarat wajib pembentukan Kampung KB menurut BKKBN (2015) yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat yang di wilayahnya (BKKBN 2015). Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada di Kampung KB, seperti mengikuti konsultasi perkembangan anak, mengikuti Tapos (Taman posyandu), mengikuti konsultasi kesehatan lansia, mengikuti senam lansia, mengikuti sosialisasi mengenai KB, mengikuti kegiatan penggunaan alat kontrasepsi yang semuanya tercakup pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan safari KB. Keikutsertaan masyarakat dimulai pada saat perencanaan kegiatan, pelaksanaan, menikmati hasil, hingga evaluasi kegiatan. Masyarakat aktif dalam memberikan saran serta

masukannya pada saat perencanaan pelaksanaan kegiatan mulai dari tempat dan waktu kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya masyarakat harus terlibat dalam pelaksanaan kegiatan BKB, BKL, safari KB, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Program Kampung KB. Masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut seperti terpantaunya perkembangan balita, terpantaunya kesehatan lansia, serta bertambahnya wawasan mengenai alat kontrasepsi dan penggunaannya. Selain itu masyarakat juga berhak terlibat dalam evaluasi program agar Program Kampung KB terus berkembang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat mengingat program ini merupakan program yang berasal dari, untuk, dan oleh masyarakat.

KERANGKA PEMIKIRAN

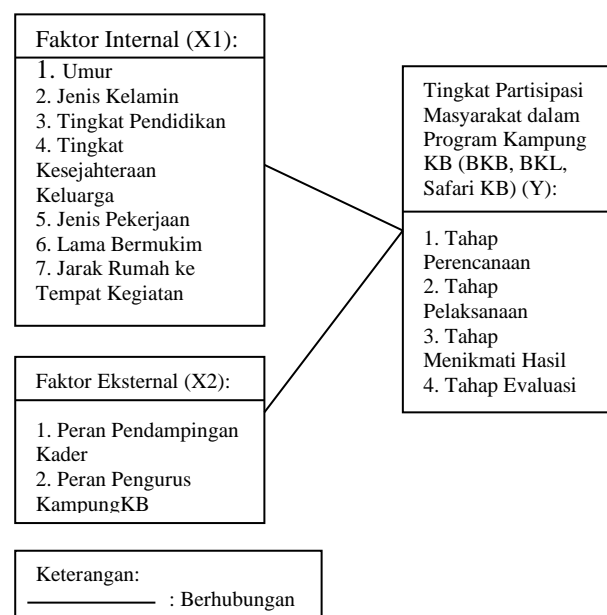
Desa Kapas adalah salah satu desa yang ditunjuk menjadi pelaksana Program Kampung KB di Kecamatan Kunjang. Kampung KB di desa ini sudah ada sejak akhir tahun 2017. Kampung KB merupakan program pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk Indonesia, namun juga mencakup beberapa sektor terkait. Oleh karenanya, Kampung KB diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Pelaksanaan yang ada di tengah masyarakat membuat Kampung KB dapat lebih dekat dengan masyarakat sehingga permasalahan yang ada di masyarakat dapat segera ditangani. Salah satu prasyarat wajib dibentuknya suatu desa menjadi Kampung KB ialah adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Peneliti menduga setiap individu mempunyai karakteristik mengenai faktor-faktor yang akan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam Program Kampung KB. Terdapat faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri individu tersebut. Faktor internal melekat kaitannya dengan karakteristik individu. Menurut Cohen dan Uphoff (1980) karakteristik individu yang mendukung masyarakat dalam berpartisipasi adalah usia dan jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, sosial, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama bermukim dan jarak rumah ke tempat kegiatan, dan masa jabatan dan status pekerjaan. Faktor internal yang berkaitan dengan KB diantaranya umur, tingkat

pendidikan, tingkat pengetahuan, pekerjaan, dan jumlah anak (Wulandari 2018).

Faktor internal yang dibahas dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, jenis pekerjaan, lama bermukim dan jarak rumah ke tempat kegiatan. Umur memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dikarenakan aktifitas seseorang ditentukan oleh umurnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Marysya (2017) yang menyatakan semakin tua seseorang maka akan semakin menurun partisipasi sosialnya. Jenis kelamin memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi karena jenis kelamin seseorang mempengaruhinya dalam melakukan aktifitas. Pada Program Kampung KB mayoritas kegiatan tersebut diperuntukkan untuk perempuan. Tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat partisipasi karena masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi biasanya kurang dapat berpartisipasi dalam masyarakat karena disibukkan dengan pekerjaannya. Tingkat kesejahteraan keluarga memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi karena biasanya semakin sejahtera suatu keluarga maka keluarga tersebut biasanya tidak membutuhkan kegiatan sosial yang ada di lingkungannya. Lama bermukim memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi dikarenakan masyarakat asli biasanya memiliki partisipasi yang tinggi dibandingkan masyarakat pendatang. Jarak rumah ke tempat kegiatan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi dikarenakan jarak rumah menentukan masyarakat dalam mengikuti suatu kegiatan. Biasanya semakin dekat jarak rumah dengan tempat kegiatan maka semakin aktif pula mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika mereka memiliki jarak rumah yang jauh maka minat untuk mengikuti kegiatan tersebut akan berkurang. Pemilihan tujuh faktor internal tersebut mempertimbangkan keterkaitan hubungan dengan penelitian yang dilakukan karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda.

Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mendukung individu tersebut dalam bertindak. Faktor eksternal dapat berupa peran pendampingan kader dan peran pengurus Kampung KB diantaranya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Peran pendampingan kader memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi karena selain masyarakat kader

memiliki peran besar dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Semakin aktif kader dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan maka semakin banyak pula masyarakat yang ikut berpartisipasi. Selain kader, pengurus Kampung KB juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan Program Kampung KB. Faktor-faktor tersebut ditentukan berdasarkan kondisi yang berada di lapang dan mendukung tingkat partisipasi anggota Kampung KB. Faktor-faktor tersebut diduga dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam program pemerintah. Menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Girsang (2011) tahapan partisipasi ada empat yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan yang dimaksud ialah perencanaan kegiatan yang ada di Kampung KB. Tahap pelaksanaan ialah tahap dimana program tersebut dilaksanakan dan masyarakat menjadi pesertanya atau pelaksana program. Tahap menikmati hasil yaitu tahap dimana manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tahap evaluasi yaitu tahap dimana masyarakat bersama pemerintah melakukan penilaian terhadap program yang sudah dilaksanakan dan berguna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang sudah berlangsung.



Gambar 1 Kerangka Analisis

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan antara faktor internal (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, jenis pekerjaan, lama bermukim, dan jarak rumah ke tempat kegiatan) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas.
2. Diduga terdapat hubungan antara faktor eksternal (peran pendampingan kader dan peran pengurus Kampung KB) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas.

PENDEKATAN LAPANGAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel responden dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang lengkap (Singarimbun dan Effendi 1989). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor internal dan faktor eksternal sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB di Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

Data kualitatif didapatkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan dan akan memfokuskan pada masyarakat Desa Kapas serta aparat pemerintah dalam pelaksanaan Program Kampung KB. Pendekatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui literatur dan data yang relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat eksplanatori karena menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) penelitian eksplanatori merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja

(*purposive*). Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan, yaitu Maret 2019 sampai dengan April 2019.

Populasi pada penelitian ini yaitu anggota aktif dalam Program Kampung KB di Desa Kapas. Responden dipilih berdasarkan beberapa kriteria yaitu: (1) merupakan penduduk dari Desa Kapas Kecamatan Kunjang, (2) menjadi anggota aktif dalam kegiatan yang ada di Kampung KB. Dari daftar anggota tersebut kemudian dilakukan pemilihan responden melalui teknik *cluster sampling*. *Cluster sampling* adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster*. Beberapa *cluster* kemudian dipilih secara sengaja sebagai wakil dari populasi, kemudian seluruh elemen dalam *cluster* terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden yang terpilih termasuk ke dalam masyarakat Desa Kapas yang berpartisipasi dalam Program Kampung KB baik kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), maupun safari KB. Masing-masing anggota dari kegiatan tersebut dipilih 20 responden sehingga didapatkan total responden dari penelitian ini sebanyak 60 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan metode survei, observasi, dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan seperti buku, jurnal penelitian, informasi terpercaya dari skripsi dan internet. Analisis data sekunder diinterpretasikan dengan menggunakan tabel frekuensi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* dan *SPSS version 22 for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kapas

Gambaran umum Desa Kapas pada penelitian ini mencakup kondisi geografis dan kependudukan dan kondisi sarana dan prasarana. Pada kondisi geografis Desa Kapas memiliki luas wilayah 203,33 Ha yang terdiri dari 4 dusun, 24 RT, dan 7 RW. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Selain itu, infrastruktur di Desa Kapas sudah cukup baik,

mulai dari sarana agama, pendidikan, olahraga, kesehatan, dan keamanan.

Latar Belakang Terbentuknya Kampung KB

Desa Kapas merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kunjang dan menjadi desa pertama yang ditunjuk menjadi pelaksana Kampung KB di Kecamatan Kunjang selanjutnya disusul oleh Desa Tengger dan Desa Kuwik. Kampung KB di Desa Kapas dicanangkan pada tanggal 4 Desember 2017. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BKKBN, Desa Kapas ditunjuk menjadi pelaksana Kampung KB dikarenakan termasuk Inpres Desa Tertinggal (IDT), daerah pinggiran, kesertaan masyarakat dalam ber-KB rendah, dan belum berjalannya catur bina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Kegiatan yang ada pada Kampung KB di desa ini diantaranya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), program Keluarga Berencana (KB), dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) namun untuk pelaksanaannya BKR dan UPPKS masih dalam tahap pendataan anggota. Kegiatan UPPKS sendiri di desa ini hanya ada 1 usaha yang terdaftar yaitu usaha makanan peyek. Pengurus sedang berupaya untuk melakukan pendataan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya melalui usaha kecil rumah tangga. Adapun hal yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti kegiatan UPPKS adalah tidak adanya bantuan dana dari pihak pemerintah desa maupun pengurus. Nantinya apabila BKR dan UPPKS sudah mulai berjalan, pengurus Kampung KB akan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya seperti lintas sektor dengan sektor pertanian, infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kegiatan di Kampung KB Desa Kapas yang sedang aktif berjalan adalah BKB, BKL dan KB. Anggota aktif Kampung KB saat ini sudah mencapai 708 orang diantaranya BKB sebanyak 215 anggota, BKL sebanyak 105 anggota, dan peserta KB aktif sebanyak 388 anggota. Bina Keluarga Balita (BKB) berbeda dengan posyandu balita. Jika posyandu balita sasarannya adalah anaknya, BKB memiliki sasaran yaitu keluarganya. Kegiatan BKB lebih berfokus pada perkembangan anak sedangkan posyandu balita cenderung berfokus kepada pertumbuhan anak.

Kegiatan BKB di Desa Kapas dilakukan secara bersamaan dengan posyandu balita sehingga apabila ibu dan anak selesai mengikuti posyandu akan dilanjutkan dengan BKB. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan BKL dan posyandu lansia sehingga apabila mengikuti posyandu lansia harus didampingi oleh keluarganya untuk berdiskusi mengenai kesehatan lansia. Kader BKB dan BKL berbeda dengan kader posyandu balita dan posyandu lansia. Pelaksanaan BKB dan BKL dilakukan 1 bulan sekali sedangkan safari KB dilakukan satu bulan sekali di minggu ketiga. Safari KB merupakan penyuluhan mengenai alat-alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh PUS lalu dilanjutkan dengan pemasangan alat kontrasepsi secara gratis. Alat kontrasepsi yang disediakan sudah terjadwal setiap bulannya sehingga PUS harus menunggu apabila alat kontrasepsi yang ingin digunakan tidak pada jadwalnya.

Adapun target dari adanya Kampung KB di Desa ini adalah dapat mengurangi jumlah penduduk, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UPPKS, terciptanya keluarga yang sehat dan berkualitas melalui BKB, BKR, BKL, dan KB. Kedepannya pengurus Kampung KB akan membuat gedung yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di Kampung KB. Pelaksanaan Kampung KB tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Kampung KB di Desa Kapas berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) namun pengurus berharap agar pemerintah dapat memberikan dana khusus untuk pelaksanaan Kampung KB sehingga kegiatan-kegiatan yang lain pun dapat dilaksanakan.

Struktur Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB di Desa Kapas

Kelompok kerja di Kampung KB Desa Kapas terdiri dari pelindung, pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas dari Pokja tersebut dibagi menjadi dua yaitu tugas di lapang dan tugas di dalam forum. Tugas di lapang dilakukan oleh sekretaris dan bendahara sementara di dalam forum dilakukan oleh pelindung, pembina, ketua dan wakil. Akan tetapi, yang lebih berperan secara langsung yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Meskipun ketua dan wakil ketua tidak pernah ada di lapang namun mereka selalu memantau kegiatan tersebut melalui sekretaris dan bendahara.

Faktor Internal

Faktor internal dalam penelitian ini terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, jenis pekerjaan, lama tinggal, dan jarak rumah ke tempat kegiatan. Sebagian besar responden yang mengikuti kegiatan BKB berada pada kategori umur dewasa awal, BKL berada pada kategori umur dewasa akhir, dan safari KB berada pada kategori umur dewasa awal. Jenis kelamin pada setiap kegiatan mayoritas diikuti oleh perempuan. Tingkat pendidikan responden BKB mayoritas berada pada kategori sedang, responden BKL termasuk pada kategori rendah, dan responden safari KB termasuk pada kategori pendidikan sedang. Tingkat kesejahteraan keluarga responden BKB, BKL, dan safari KB mayoritas berada di keluarga sejahtera 2. Jenis pekerjaan responden BKB dan safari KB mayoritas tidak bekerja karena diikuti oleh ibu rumah tangga sedangkan responden BKL mayoritas pekerjaannya sebagai petani.

Lama tinggal responden BKB yaitu rendah, responden BKL yaitu tinggi serta responden safari KB yaitu sedang. Jarak rumah ke tempat kegiatan BKB termasuk pada kategori jauh, kegiatan BKL termasuk pada kategori dekat, dan kegiatan safari KB termasuk pada kategori jauh.

Faktor eksternal dalam penelitian ini yaitu peran pendampingan kader dan peran pengurus Kampung KB. Peran pendampingan kader pada kegiatan BKB dan safari KB termasuk pada kategori sangat berperan sedangkan responden BKL termasuk pada kategori berperan. Peran pengurus Kampung KB pada kegiatan BKB termasuk pada kategori sangat berperan, BKL termasuk pada kategori tidak berperan, dan pada kegiatan safari KB termasuk pada kategori sangat berperan.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Kb Desa Kapas

Penelitian Ini merujuk pada tahapan partisipasi menurut Uphoff (1979), yaitu dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Pada perencanaan Program Kampung KB, masyarakat tidak dilibatkan dalam pertemuan karena Program Kampung KB merupakan program pemerintah yang sifatnya *top down* (isi program sudah baku atau tidak dapat diubah). Perencanaan program hanya dihadiri oleh perangkat desa, PLKB, bidan desa, RT, RW, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat. Pada penelitian ini perencanaan oleh anggota Kampung KB yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan bukan perencanaan program. Program Kampung KB di Desa Kapas masih tumpang tindih, artinya pada satu kesempatan dapat dilakukan tiga tahap sekaligus seperti pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Mayoritas responden tergolong memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam Program Kampung KB di Desa Kapas. Hal tersebut dikarenakan anggota sudah aktif dalam mengikuti semua tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi.

Perencanaan Program Kampung KB di Desa Kapas tidak dilakukan bersama masyarakat umum, sehingga pada tahap perencanaan pada penelitian ini yaitu tahap perencanaan kegiatan. Tahap perencanaan kegiatan di Kampung KB Desa Kapas termasuk pada kategori tinggi baik pada kegiatan BKB, BKL, maupun safari KB. Perencanaan kegiatan pada kegiatan BKB dan BKL dilakukan pada saat kegiatan posyandu sehingga semua masyarakat dapat mengikutinya. Pada pertemuan tersebut membahas mengenai informasi yang ada di Kampung KB secara menyeluruh, mekanisme jalannya kegiatan, sasaran program, waktu dan tempat pelaksanaan, serta hasil yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut didiskusikan bersama masyarakat sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk memberikan pendapat dan sarannya.

Pelaksanaan kegiatan BKB dan BKL dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu yaitu satu bulan sekali. Pelaksanaan kegiatan safari KB dilaksanakan di Puskesmas Desa Kunjang setiap bulan pada minggu ketiga. Pelaksanaan seluruh kegiatan di Kampung KB baik BKB, BKL, maupun safari KB termasuk pada kategori sedang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah aktif untuk datang dan memberikan pendapat mereka mengenai kegiatan tersebut namun keputusan tertinggi tetap berada di tangan kader dan pengurus Kampung KB.

Manfaat dari adanya Program Kampung KB dapat diperoleh secara langsung oleh masyarakat. Pada kegiatan BKB, anggota dapat mendapatkan pengetahuan mengenai perkembangan anak dikelompok umur tertentu dan dapat memantau perkembangan anaknya dengan konsultasi bersama kader secara gratis. Pada kegiatan BKL, anggota dapat memantau kesehatan mereka secara gratis selain itu dapat bertemu dengan anggota lainnya

sehingga dapat menghilangkan rasa suntuk berada di rumah. Pada kegiatan safari KB masyarakat dapat memperoleh pelayanan KB secara gratis, selain itu juga dapat memperoleh pengetahuan mengenai berbagai alat kontrasepsi. Tahap menikmati hasil secara keseluruhan kegiatan yang ada di Kampung KB berada pada kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat memperoleh hasil dari setiap kegiatan secara maksimal.

Evaluasi dilaksanakan setiap tiga minggu sekali pada kegiatan BKB dan BKL. Namun pada kegiatan safari KB, evaluasi dapat dilaksanakan setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada kegiatan evaluasi masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian dan saran terhadap kegiatan selanjutnya. Secara keseluruhan, evaluasi pada Program Kampung KB di Desa Kapas termasuk pada kategori sedang di setiap kegiatan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan saran mereka seperti adanya pengobatan gratis untuk lansia, penyediaan alat kontrasepsi secara lengkap pada saat kegiatan safari KB, arisan untuk anggota BKB, senam lansia dan lain sebagainya. Akan tetapi keputusan untuk mengimplementasikan saran tersebut masih berada di tangan kader dan pengurus Kampung KB.

Hubungan Faktor Internal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Faktor internal yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, jenis pekerjaan, lama bermukim, dan jarak rumah ke tempat kegiatan. Kemudian dari faktor internal tersebut dilakukan uji *Rank Spearman* untuk data ordinal dan *Chi Square* untuk data nominal. Umur tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasinya yaitu 0.026 dan nilai signifikansi sebesar 0.846. Hal tersebut dikarenakan kegiatan BKB, BKL, maupun safari KB diperuntukkan untuk umur tertentu, misalnya BKL diikuti oleh lansia.

Jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi dengan nilai signifikansi sebesar 0.321. Hal tersebut dikarenakan Program Kampung KB mayoritas diperuntukkan untuk perempuan sehingga keterlibatan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisiennya sebesar 0.075 dan

nilai signifikansi sebesar 0.0569. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan tidak menentukan partisipasi masyarakat karena semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB tanpa dibatasi oleh pendidikannya.

Tingkat kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasinya 0.070 dan nilai signifikansinya sebesar 0.593. Hal tersebut dikarenakan semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB, baik masyarakat yang mampu atau kurang mampu. Jenis pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi dengan nilai signifikansi sebesar 29.384. Hal tersebut dikarenakan responden yang tidak bekerja memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan partisipasi dibandingkan dengan responden yang memiliki pekerjaan lama bermukim tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasinya sebesar 0.014 dan nilai signifikansinya sebesar 0.916. Hal tersebut dikarenakan Program Kampung KB dapat diikuti oleh semua penduduk yang ada di Desa Kapas, baik itu penduduk asli maupun pendatang. Jarak rumah ke tempat kegiatan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi. Nilai koefisien korelasinya yaitu 0.247 dan nilai signifikansinya sebesar 0.057. Hal tersebut dikarenakan responden akan tetap mengikuti kegiatan tersebut meskipun jarak rumah mereka jauh ataupun dekat dengan tempat kegiatan. Selain karena kebutuhan, kegiatan yang ada di Kampung KB diberikan secara gratis sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaatnya secara maksimal.

Hubungan Faktor Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran pendampingan kader dan pengurus Kampung KB. Pada pengolahan data antara peran pendampingan kader dengan tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh kegiatan di uji menggunakan uji *Rank Spearman*. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.664 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal tersebut berarti H1 diterima yang berarti terdapat hubungan positif antara peran pendampingan kader dengan tingkat partisipasi masyarakat. Peran kader sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat karena kader aktif dalam mengajak, membimbing, serta

mendukung masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB.

Pada pengolahan data antara peran pengurus Kampung KB dengan tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh kegiatan di uji menggunakan uji *Rank Spearman*. Nilai koefisien korelasi sebesar -0.274 dan nilai signifikansi sebesar 0.034. Hal tersebut berarti H1 diterima, artinya terdapat hubungan negatif antara peran pengurus Kampung KB dengan tingkat partisipasi masyarakat. Selain kader, pengurus juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang aktif pada kegiatan, mereka melihat pengurus sangat berperan dalam hal mengajak hingga memberikan masukan pada saat terjadi masalah. Namun, pada masyarakat yang aktif peran pengurus kurang dapat dirasakan karena mereka sudah sadar akan pentingnya kegiatan tersebut sehingga akan aktif tanpa adanya ajakan dari pengurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kampung KB Desa Kapas secara keseluruhan berada pada kategori tinggi. Tingkat partisipasi yang paling tinggi berada pada tahap perencanaan kegiatan. Tingkat partisipasi dari ketiga kegiatan tersebut yang paling tinggi adalah kegiatan safari KB. Pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan BKB memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara kegiatan BKL dan safari KB, tahap pelaksanaan kegiatan safari KB yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi diantara kegiatan BKL dan safari KB namun masih berada pada kategori sedang, tahap menikmati hasil kegiatan safari KB berada pada tingkat partisipasi paling tinggi diantara kegiatan BKL dan safari KB, dan pada tahap evaluasi masing-masing kegiatan BKB, BKL, maupun safari KB berada pada tingkat partisipasi sedang.

2. Dari faktor internal (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan keluarga, jenis pekerjaan, lama bermukim, dan jarak rumah ke tempat kegiatan) maka kategori umur dewasa awal memiliki tingkat partisipasi tinggi, jenis kelamin perempuan memiliki tingkat partisipasi tinggi,

tingkat pendidikan sedang memiliki partisipasi tinggi, tingkat kesejahteraan keluarga 2 memiliki tingkat partisipasi tinggi, jenis pekerjaan tidak bekerja memiliki partisipasi tinggi, lama bermukim sedang dan tinggi memiliki partisipasi tinggi, serta jarak rumah jauh memiliki partisipasi tinggi. Diantara faktor internal tersebut yang berhubungan secara signifikan dengan tingkat partisipasi yaitu pada indikator jenis pekerjaan.

3. Dari faktor eksternal (peran pendampingan kader dan peran pengurus Kampung KB), maka kader yang sangat berperan memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi dan pengurus Kampung KB yang sangat berperan memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Kedua faktor eksternal tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Program Kampung KB serta PLKB diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan program Kampung KB sehingga program tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat terutama di Desa Kapas. Selain itu pengurus Kampung KB dan PLKB hendaknya turut memantau kegiatan secara langsung tidak hanya sekretaris dan bendahara agar dapat melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan di Kampung KB guna memperbaiki kegiatan selanjutnya. Adapun PLKB sebaiknya tidak hanya memberikan pembinaan kepada kader dan pengurus saja namun kepada masyarakat melalui sosialisasi program.

2. Pemerintah hendaknya lebih fokus kepada peran kader dan peran pengurus Kampung KB karena hal tersebut yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang ada di Kampung KB sehingga program Kampung KB dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Tingkat partisipasi masyarakat harus dipertahankan pada setiap tahapannya. Hal tersebut guna memperbaiki kualitas dari kegiatan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Masyarakat juga disarankan untuk mengajak masyarakat lain yang belum tergabung dalam kegiatan di Kampung KB agar manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Kapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiat M. 2018. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Maligano Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. *Jurnal Rez Publica* [Internet]. [Diunduh tanggal 12 Desember 2018]. 1(2); 1-10. Kendari (ID): Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Halu Oleo. Dapat diunduh di: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/19/3023>
- Arnstein SR. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. *JAIP*. 35(4): 216-224. [Diunduh pada 12 Desember 2018]. Terdapat pada: <http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>.
- Bintang JM. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana Banjar Pilon Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. [Internet]. [Diunduh tanggal 1 Januari 2019]. Dapat diunduh di: <http://repository.ub.ac.id/5627/>
- [BKKBN] Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2016. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN
- Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 2017. *Petunjuk Teknis Kampung KB*. Jakarta: BKKBN
- Persebaran Kampung KB. Dapat diunduh di: kampungkb.bkkbn.go.id
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Pendidikan. Dapat diunduh di: <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/28>
- Badan Pusat Statistik. 2019. Usia. Dapat diunduh di: <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/12>.
- Cheelie, Susanti IC. 2018. Kampung KB Upaya Nyata Membangun Bangsa; Cheelie, Haryanti D; Editor. Jakarta (ID): Yayasan Cipta Cara Pandu
- Cohen J, Uphoff N. 1980. *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. *World Development*.8: 213-135. [Diunduh pada 12 Desember 2018]. Terdapat pada: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X).
- Data Monografi Desa Kapas. 2018: Balai Desa Kapas
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3S.
- Febriansyah M. 2015. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: <https://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/?p=1506>
- Girsang LJ. 2011. Faktor yang Mendukung Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Megamendung, Bogor). [Skripsi]. [Internet]. [Diunduh tanggal 11 November 2018]. Dapat diunduh di: <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/49980/1/11ljg.pdf>
- Hartoyo, dkk. 2010. Studi Nilai Anak, Jumlah Anak yang Diinginkan dan Keikutsertaan Orang Tua dalam Program KB. [Internet]. [Diunduh tanggal 11 November 2018]. Dapat diunduh di: ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/jikk/v4n1_5.pdf
- Ife J, Tesoriero F. 2008. *Community Development*. Yogyakarta (ID):Pustaka Pelajar.
- Istiadi A. 2017. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi pada Kelompok Sasaran Keluarga dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). [Internet]. [Diunduh tanggal 7 September 2018]. Dapat diunduh di: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/20687/18965>
- Kampung KB Desa Kapas. 2018: Balai Desa Kapas
- Karwur SE. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 2 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnal_eksekutif/article/view/11071/10660
- Laksana NS. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa

- Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Nuring%20Septyasa%20Laksana.pdf>
- Mardiyono. 2017. Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso). [Internet]. [Diunduh pada tanggal 7 September 2018]. Dapat diunduh di: <http://www.cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala/article/view/13>
- Marysya P. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Potensi Data Di Kampung Wisata Situ Gede Bogor (Kasus Kampung Wisata Situ Gede, Bogor). [Skripsi]. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 25 Februari 2018]. Dapat diunduh di: <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/89474/1/I17pma.pdf>
- Milad FA. 2016. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 11 November 2018]. Dapat diunduh di: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82440>
- Mugniyah. 2006. *Materi Bahan Ajar Ilmu Penyuluhan*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor
- Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Bogor (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [RI] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional.
- Rahmeina FR. 2017. Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru. [Internet]. [Diunduh tanggal 12 Desember 2018]. Dapat diunduh di: <https://media.neliti.co./media/publications/206857-koordinasi-dalam-program-kampung-kb-di-k.pdf>
- Rizal M. 2016. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria di Kecamatan Kampar Kiri Hilir). [Internet]. [Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11247/10895>
- Rofiq A. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Keberhasilan Pengembangan Program Posyandu Lansia di Puskesmas Jagir Surabaya. [Internet]. [Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: http://repository.unair.ac.id/74689/3/JURNAL_Fis.AN.87%2018%20Rof%20p.pdf
- Saputra, EY. 2016. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Ampit, Kabupaten Siak, Riau). [Skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [Diunduh 20 Oktober 2018]. Dapat diunduh di: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/81958/I16yes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Singarimbun M, Effendi S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3S.
- Suroso H, Hakim A, Noor I. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. [Internet]. [Diunduh pada 25 Februari 2019]. Dapat diunduh di: <http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>.
- Susanso D. 2010. Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat. [Internet]. [Diunduh pada 6 Februari 2019]. Dapat diunduh di: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/5696/4324>.
- Swedianti K. 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pemanfaatan hasil Program Ekonomi Bergulir PNPM-MP di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor). [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Wicaksono AM. 2010. Analisis Tingkat Partisipasi Warga dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT Isuzu Astra Motor Indonesia Assy Plant Pondok Ungu). [Skripsi]. [Internet]. [Diunduh tanggal 19 Februari 2019]. Dapat diunduh di: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27290>
- Wulandari D. 2018. Kajian Karakteristik Kampung Keluarga Berencana (KB) di Dusun Munggut Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Nganjuk. [Internet]. [Diunduh tanggal 7 September 2018]. Dapat diunduh di: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swarabhumi/article/view/24639/22553>
- Wulansari D. 2009. Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung (ID): Refika Aditama
- Zaeni A. 2006. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing. [Thesis]. [Diunduh tanggal 5 Desember 2018]. Dapat diunduh di: http://eprints.undip.ac.id/15303/1/Akhmad_Zaeni.pdf